



LAPORAN KINERJA BPS KOTA SURABAYA TAHUN 2022



LAPORAN KINERJA **BPS KOTA SURABAYA TAHUN 2022**

Katalog BPS : 1202059.3578

No. Publikasi : 35780.2301

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xiv + 84 halaman

Naskah:

BPS Kota Surabaya

Gambar Kulit:

BPS Kota Surabaya

Diterbitkan oleh: BPS Kota Surabaya

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2022 BPS Kota Surabaya merupakan wujud pertanggung jawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Kota Surabaya sebagai penyelenggara negara, dengan mengkomunikasikan atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan, mengevaluasi capaian kinerja, tujuan dan sasaran BPS Kota Surabaya selama tahun 2022.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, perkembangan realisasi kinerja selama lima tahuan terakhir, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Surabaya tahun 2020-2024. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan ini, pimpinan Badan Pusat Statistik Kota Surabaya mengucapkan terima kasih. Kami tetap mengharapkan saran yang konstruktif, untuk perbaikan dimasa datang.

Surabaya, 31 Januari 2023 Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surabaya,

Agus Budi Santoso

DAFTAR ISI

Kata Pengan	tar	ii
Daftar Isi		1
Daftar Tabel		vi
Daftar Grafi	k dan Gambar	ix
Daftar Lamp	iran	X
	ksekutif	xii
Bab 1. Penda	huluan	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi	
	BPS Kota Surabaya	2
1.3.	Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran	4
1.4.	Potensi dan Permasalahan	6
1.5.	Sistematika Penyajian Laporan	7
Bab 2. Peren	canaan Kinerja	
2.1.	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPS Kota Surabaya	11
2.2.	Renstra BPS Kota Surabaya 2020-2024	17
2.3.	Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Surabaya 2022	24
Bab 3. Akunt	tabilitas Kinerja	
3.1.	Analisis Capaian Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2022	26
3.1.1.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Pertama	26
	Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Kedua	32
	Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Ketiga	41
	Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Keempat	46
	Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2018 – 2022	49
3.1.6.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Terhadap Target Renstra 2020, 2022 dan 2024	50
3.1.7.	Analisis Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian	
	Kinerja (Suplemen)	52
3.2.	Prestasi BPS Kota Surabaya Tahun 2022	57
3.3.	Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2022	57
3.3.1.	Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program	57
3.3.2.	Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi	
	Anggaran per Program dan Sasaran	58
3.3.3.	Upaya Efisiensi Anggaran dan Nilai Efisiensi Anggaran	60
Bab 4. Penut	up	
4.1.	Kesimpulan	68
4.2.	Tindak Lanjut	68
Lamniran		71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pagu Anggaran Belanja BPS Kota Surabaya Tahun 2022	6
Tabel 2.1.	Visi dan Misi BPS Kota Surabaya 2020-2024	12
Tabel. 2.2.	Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kota Surabaya 2020 – 2024	15
Tabel. 2.3.	Tujuan Dan Sasaran BPS Kota Surabaya 2020-2024	17
Tabel. 2.4.	Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	
	BPS Kota Surabaya Tahun 2022	21
Tabel 2.5.	Perjanjian Kinerja 2022	24
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Tujuan Pertama: Menyediakan Data Statistik	
	Untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan	26
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Tujuan Kedua: Meningkatnya Kolaborasi,	
	Integrasi Dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan SSN	33
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Tujuan Ketiga: Meningkatnya Pelayanan	
	Prima Dalam Penyelenggaraan SSN	42
Tabel 3.4.	Capaian Kinerja Tujuan Keempat: Penguatan	
	Tata Kelola Kelembagaan Dan Reformasi Birokrasi	46
Tabel 3.5.	Hasil Evaluasi Desk Evaluation implementasi SAKIP	47
Tabel 3.6.	Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2018 – 2022	49
Tabel 3.7.	Capaian Kinerja 2022 terhadap Target	
	Renstra 2020, 2022 dan 2024	50
Tabel 3.8.	Capaian Kinerja Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian	
	Kinerja (Suplemen)	52
Tabel 3.9.	Monitoring Pelaporan LHKPN dan LHKASN	55
Tabel 3.10.	Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program	58
Tabel 3.11.	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per	
	Program dan Sasaran	58
Tabel 3.12.	Rekapitulasi Pagu Anggaran BPS Kota Surabaya Tahun 2022	61

DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi BPS Kota Surabaya Berdasarkan	
	Peraturan Badan Pusat Statistik No. 8 Tahun 2020	4
Gambar 1.2.	SDM BPS Kota Surabaya Menurut Tingkat Pendidikan	5
Gambar 2.1.	Peta Strategi BPS Kota Surabaya 2020–2024	18
Gambar 2.2.	Nilai-Nilai Inti Aparatur Sipil Negara (ASN)	22
Gambar 2.3.	Employer Branding ASN	23
Gambar 3.1.	Hasil SKD 2022	31
Gambar 3.2.	Publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi	31
Gambar 3.3.	Surat Direktur Statistik Industri Tentang Tunda Rilis	
	VIMK 2021	31
Gambar 3.4.	Surat Direktur Statistik Peternakan, Perikanan dan	
	Kehutanan Tentang Rilis Publikasi Sitasi 2021	32
Gambar 3.5.	Rekomendasi Statistik di Aplikasi romantik.bps.go.id	36
Gambar 3.6.	Muatan Dalam Metadata Kegiatan	37
Gambar 3.7.	Indikator Metadata	38
Gambar 3.8.	Variabel Metadata	38
Gambar 3.9.	Pengumpulan Metadata Melalui Aplikasi indah.bps.go.id	41
Gambar 3.10.	Pembinaan Statistik BPS Kota Surabaya dengan	
	OPD-OPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022	45
Gambar 3.11.	LHE Atas Implementasi SAKIP BPS Kota Surabaya	
	Tahun 2022	47
	Melakukan Pemaliharaan Gedung Kantor dan AC	49
	Pojok Statistik di Universitas Surabaya	53
Gambar 3.14.	Piagam Penghargaan Terbaik I BPS Kabupaten/Kota	
	di Jawa Timur Sebagai Satuan Kerja Dengan	
	Penyelesaian Kegiatan Statistik Harga Tahun 2021	57
Gambar 3.15.	Himbauan Kampanye Hemat Energi	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Susunan Organisasi	71
Lampiran 2. Renstra 2020-2024	73
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2022	75
Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja 2022	77
Lampiran 5. SDM BPS Kota Surabaya Tahun 2022	79
Lampiran 6. Kegiatan BPS Kota Surabaya 2022	81
Lampiran 7. Judul Publikasi Yang Terbit Tahun 2022	83

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja BPS Kota Surabaya disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Surabaya atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Visi yang telah ditetapkan:

"Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju" ("Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia")

Untuk mewujudkan Visi dapat dicapai dengan Misi:

- 1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
- 2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
- 3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
- 4. Membangun SDM berlandaskan yang unggul dan adaptif nilai profesionalisme, integritas dan amanah

Untuk melaksanakan Visi dan Misi terdapat 4 (empat) tujuan strategis yang harus dicapai BPS Kota Surabaya pada tahun 2022, yaitu:

- 1. Tujuan pertama yaitu "Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan" dengan sasaran strategis "Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas" rata-rata capaian kinerja sebesar 85,60 persen;
- 2. Tujuan kedua yaitu "Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN" dengan sasaran strategis "Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN" rata-rata capaian kinerja sebesar 96,15 persen;
- 3. Tujuan ketiga "Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN" dengan sasaran strategis "Penguatan statistik sektoral K/L/D/I" rata-rata capaian kinerja sebesar 108,33 persen; dan
- 4. Tujuan keempat "Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi" dengan sasaran strategis "SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan" rata-rata capaian kinerja sebesar 106,79 persen.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dari program dan kegiatan yang diusulkan, pada Tahun Anggaran 2022 BPS Kota Surabaya mendapatkan pagu sebesar Rp. 54.394.013.000 dengan realisasi sebesar Rp. 50.766.506.840 (93,33 persen).

Dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan masih banyak kendala yang dihadapi, sehingga banyak target-target yang belum bisa dicapai. Untuk itu BPS Kota Surabaya akan terus meningkatkan kinerjanya, terutama yang berhubungan dengan kualitas data, pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan pembinaan statistik sektoral K/L/D/I.

Bab 1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Berdasarkan Peraturan Presiden PP Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pusat Statistik Kota Surabaya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPS Kota Surabaya Tahun 2022.

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya sesuai Amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat, data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari kementerian atau lembaga pemerintah lainnya sebagai data sekunder, membantu kegiatan statistik di kementerian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional, mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik, membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kota Surabaya

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa BPS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar. Sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 8 tahun 2020 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota disebutkan, bahwa Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kota Surabaya sebagai berikut:

1) Kedudukan

BPS Kota Surabaya adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi Jawa Timur.

2) Tugas

Melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kota Surabaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan statistik dasar di Kota Surabaya;
- b. Pengkordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kota Surabaya;
- c. Pelancaran dan Pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di Kota Surabaya; dan



d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPS Kota Surabaya.

4) Susunan Organisasi

Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan penyederhanan birokrasi guna mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif dan efisien, maka Kepala Badan Pusat Statistik mengeluarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, yang ditetapkan tanggal 17 Desember 2020 dan diundangkan tanggal 22 Desember 2020, sehingga susunan Organisasi BPS Kota Surabaya berubah menjadi sebagai berikut:

a. Kepala BPS Kota Surabaya

Kepala BPS Kota Surabaya mempunyai tugas memimpin BPS Kota Surabaya sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Kota Surabaya, serta membina aparatur BPS Kota Surabaya agar berdaya guna dan berhasil guna.

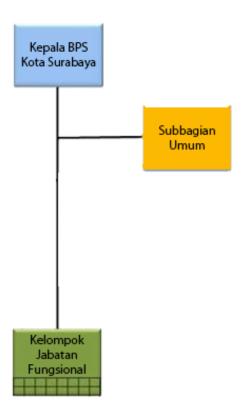
b. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan dan rumah tangga.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Surabaya, sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan. Dalam melaksanakan tugasnya, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi pelayanan fungsional sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsi BPS Kota Surabaya. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas

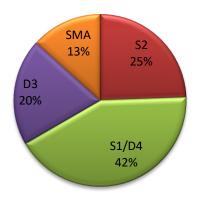
mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPS Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 8 Tahun 2020

1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

Untuk menjalankan tugasnya, BPS Kota Surabaya didukung SDM sebanyak 45 orang dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda, untuk ditempatkan pada struktural maupun fungsional yang ada di BPS Kota Surabaya. Menurut jenjang pendidikan, pegawai yang berpendidikan S2 sebanyak 11 orang, yang berpendidikan S1/D-IV berjumlah 19 orang, yang berpendidikan D-III berjumlah 9 orang dan 6 orang berpendidikan SMA.



Gambar 1.2. SDM BPS Kota Surabaya Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan gambar 1.2. terlihat komposisi pegawai BPS Kota Surabaya dengan pendidikan D-IV/S1 ke atas mencapai 67 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa mayoritas SDM BPS Kota Surabaya mempunyai kualitas yang baik. Aset besar ini sangat cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Surabaya.

Pencapaian target terhadap visi dan misi Badan Pusat Statistik Kota Surabaya didukung juga oleh penganggaran. Dukungan penganggaran tersebut diwujudkan melalui 2 (dua) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen (Dukman), (2) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Program Dukungan Manajemen (Dukman) BPS Kota Surabaya bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Sasaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas, dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik, BPS Kota Surabaya secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah anggaran BPS Kota Surabaya menurut program pada tahun 2022.

Tabel 1.1. Pagu Anggaran Belanja BPS Kota Surabaya Tahun 2022

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Program Dukungan Manajemen (Dukman)	6.940.076.000
2	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	47.453.937.000
	Jumlah	54.394.013.000

1.4. Potensi dan Permasalahan

1.4.1. Potensi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi badan yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

BPS Kota Surabaya bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Kota Surabaya. BPS telah memiliki payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan perstatistikan. Hal tersebut menjadi kekuatan bagi BPS untuk mengembangkan kegiatan perstatistikan kedepan.

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sangat potensial dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data,

maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS Kota Surabaya, merupakan salah satu potensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan serta pelayanan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh konsumen.

BPS Kota Surabaya juga ditunjang oleh kualitas SDM yang cukup baik dari segi pendidikannya yang didominasi oleh pegawai berpendidikan D-IV/S1. Perpaduan antara kedua potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi.

1.4.2. Permasalahan

BPS harus lebih meningkatkan peran sebagai pembina statistik sektoral bagi kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah. Terlebih bahwa Pemerintah Daerah sudah memiliki satuan perangkat pemerintah daerah urusan Komunikasi, Informasi dan Statistik. BPS harus berkoordinasi, bekerja sama dengan berbagai pihak melalui forum satu data.

Selain peningkatan peran BPS sebagai Pembina urusan statistik, permasalahan yang dihadapi BPS adalah bagaimana cara untuk meningkatkan serta mempertahankan kualitas data yang dihasilkan, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pengguna data. Walaupun data tingkat kepuasan pengguna data BPS sudah menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, namun harus tetap senantiasa memunculkan inovasi-inovasi yang sesuai dengan perkembangan mutakhir. Prosedur penjaminan kualitas harus dapat diterapkan di semua kegiatan BPS secara bertahap, penerapan teknologi informasi sehingga data semakin cepat tersaji dan meminimalkan *error*/kesalahan data. Era Big Data tidak mungkin dihindari, oleh sebab itu BPS harus dapat mengikuti dan menggunakan data perkembangan global yang sangat cepat dengan menerapkan perangkat teknologi yang efisien, efektif serta ekonomis.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS Kota Surabaya tahun 2021 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. **Pendahuluan**, menyajikan latar belakang; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS Kota Surabaya; sumber daya manusia dan dukungan anggaran, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS Kota Surabaya; serta sistematika penyajian laporan.
- Bab II. **Perencanaan Kinerja**, berisi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPS Kota Surabaya, Reviu Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Surabaya 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Surabaya 2022.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja,

- Analisis capaian kinerja BPS Kota Surabaya meliputi evaluasi kinerja, penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja, solusi yang telah dilakukan serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar capaian kinerja di tahun berikutnya meningkat. Poin-poin yang perlu dianalisis adalah sebagai berikut:
 - Realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 (analisis capaian total, capaian per sasaran, dan capaian per IKU);
 - Perbandingan capaian kinerja total tahun 2022 sampai dengan 2018;
 - Realisasi kinerja per IKU dari tahun 2022 sampai dengan tahun pertama periode Renstra;
 - Realisasi kinerja per IKU tahun 2022 terhadap target Renstra tahun 2022;
 - Realisasi kinerja per IKU tahun 2022 terhadap target akhir Renstra;
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.
- > Prestasi dan Inovasi Satker Tahun 2022.
- Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2022.
 - Pagu dan Realisasi Anggaran menurut Program dan Sasaran



- Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Program dan Sasaran
- Upaya Efisiensi Anggaran (penggunaan sumber daya) dan Nilai Efisiensi Anggaran
- Penutup, berupa kesimpulan dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun Bab IV. berikutnya.

Bab 2. Perencanaan Kinerja

2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPS Kota Surabaya

2.1.1. Visi BPS Kota Surabaya

Visi BPS Kota Surabaya dengan mengacu Visi Badan Pusat Statistik 2020-2024 yaitu dibangun dengan memperhatikan berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan yang dihadapi melalui landasan pemikiran yang proaktif. Pembangunan nasional dibidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan berkualitas. data Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka Visi BPS Kota Surabaya:

"Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju" ("Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia")

BPS Kota Surabaya mempunyai tugas pokok menyediakan dan melakukan koordinasi ketersediaan data dan informasi statistik pada lingkup nasional maupun daerah. Kata "Penyelenggara Statistik Dasar" mempunyai makna bahwa BPS Kota Surabaya sebagai Penyelenggara Statistik Dasar yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan cara sensus, survei, kompilasi dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata "data statistik yang berkualitas" yaitu data statistik yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi saat ini, akurat artinya data tersebut mencerminkan keadaan dilapangan, tepat waktu dan mudah di akses oleh pengguna.

Dengan visi tersebut, eksistensi BPS Kota Surabaya sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan data statistik berkualitas.

Proses penyediaan data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS Kota Surabaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang disebarluaskan melalui berbagai media dan berbagai cara agar pemanfaatannya bisa menjangkau secara luas, baik di dalam maupun diluar negeri.

2.1.2. Misi BPS Kota Surabaya

Misi BPS Kota Surabaya dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJMN 2020-2024, misi BPS dan tugas, fungsi dan kewenangan BPS Kota Surabaya. Perumusan misi BPS Kota Surabaya juga dilakukan dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Rumusan tersebut dimaksudkan untuk mampu mencakup semua pesan yang tercakup dalam visi, memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, memberi petunjuk kelompok sasaran termasuk instansi pemerintah yang akan dilayani dan memperhitungkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Pernyataan Misi BPS Kota Surabaya yang dikaitkan dengan Visi BPS Kota Surabaya dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Visi dan Misi BPS Kota Surabaya 2020-2024

ya			MISI BPS Kota Surabaya 2020-2024			
ıraba		Penyedia Data	Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional			
ota Su	-2024	Statistik Berkualitas	2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan			
SKo	2020	Untuk Indonesia Maju	3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional			
Visi BI		muoneetu Muju	4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah			

Misi BPS Kota Surabaya tahun 2020-2024 mengandung arti:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya merupakan penyelenggara statistik dasar di Kota Surabaya, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah ,maupun masyarakat (Perpres No. 86 Tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut

pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009: 187). Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS, meliputi relevance (relevansi), accuracy (akurasi), timeliness (aktualitas) & punctuality (tepat waktu), accessibility (aksesibilitas), coherence (koherensi) & comparability (keterbandingan), interpretibility (interpretibilitas).

... dan berstandar internasional...

"Setiap penyelenggaraan kegiatan, BPS akan berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*".

2. Membina K/L/D/I Melalui Sistem Statistik Nasional yang Berkesinambungan

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997). BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesional, integritas, dan amanah

SDM statistik yang unggul dan adaptif tercermin pada Insan statistik yang profesionalisme, berintegritas, dan amanah

... profesional...

"Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas".

... integritas ...

"Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka(menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)".

...amanah...

"Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik".

Selain itu SDM statistik yang unggul dan adaptif tercermin pada Insan statistik yang BerAKHLAK sebagaimana *Core Values* untuk seluruh ASN berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara.



2.1.3. Tujuan BPS Kota Surabaya

Tujuan diartikan sebagai kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Rumusan tujuan BPS Kota Surabaya untuk dapat mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Kota Surabaya dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini.

Tabel. 2.2. Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kota Surabaya 2020 - 2024

aya		MISI BPS Kota Surabaya 2020-2024 1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional		
Visi BPS Kota Surabaya 2020-2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas	Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan		
	Untuk Indonesia Maju	3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistic untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional		
Vis		4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah		
2024	Menyediakan pembangunar			
TUJUAN 2020-2024	Peningkatan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN.			
TUIN	G	pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN. a kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi		

Adapun keterkaitan tujuan BPS Kota Surabaya terhadap misi BPS Kota Surabaya dalam rangka mencapai visi BPS Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan:

- Misi ke-1 : Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan inernasional
- 2. Tujuan 2: Peningkatan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan:
- $\mbox{Misi ke-2} : \mbox{Membina } \mbox{K/L/D/I melalui Sistem Statistik} \mbox{Nasional yang} \\ \mbox{berkesinambungan}$
- 3. Tujuan 3: Peningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan:
 - Misi ke-3 : Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
- 4. Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

 Misi ke-4 : Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai
 profesionalisme, integritas dan Amanah

2.1.4. Sasaran Strategis BPS Kota Surabaya

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumberdaya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS Kota Surabaya yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Program BPS Kota Surabaya terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik yang merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung

dan atau administrasi BPS Kota Surabaya (pelayanan internal). Adapun tujuan dan sasaran strategis BPS Kota Surabaya -wide dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.3. Tujuan Dan Sasaran BPS Kota Surabaya 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		
T1. Menyediakan Data Statistik untuk	SS1. Meningkatnya Pemanfaatan data		
dimanfaatkan sebagai dasar	statistik yang berkualitas		
pembangunan			
T2. Peningkatan kolaborasi, integrasi,	SS2. Penguatan Komitmen K/L/D/I		
sinkronisasi dan standarisasi dalam	terhadap SSN		
penyelenggaraan SSN			
T3. Peningkatkan pelayanan prima	SS3. Penguatan Statistik Sektoral		
dalam penyelenggaraan SSN	K/L/D/I		
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan	SS4. SDM Statistik yang Unggul dan		
dan reformasi	berdaya saing dalam kerangka		
	tata kelola kelembagaan		

2.2. Renstra BPS Kota Surabaya 2020-2024

Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu "Mewujudkan bangsa yang berdaya saing" sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Renstra BPS Kota Surabaya tahun 2020–2024 disusun dengan mengikuti arahan Presiden dengan mengikuti *money follow program*, yang artinya seluruh Program K/L harus mengikuti arahan visi misi yang ditetapkan Presiden, sehingga program-program antar K/L dapat disinergikan. Oleh karena itu, dalam Renstra BPS Kota Surabaya ini termasuk restrukturisasi program, sesuai dengan arahan Presiden tersebut yang ditujukan untuk menunjukkan nomenklatur program yang dapat menggambarkan *outcome* dalam pencapaian sasaran pembangunan baik pencapaian yang dilakukan oleh satu Kementerian/Lembaga, maupun antar Kementerian/Lembaga (lintas K/L), sesuai dengan kesepakatan dalam *Trilateral Meeting* (TM) restrukturisasi program BPS yang terdiri dari: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan (2) Program Dukungan Manajemen.

Dalam penyusunannya, BPS menjabarkan 4 (empat) misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process*, dan perspektif *learning and growth*. Pendekatan ini untuk mempermudah implementasi dalam pencapaian sasaran strategis dari sistem penganggaran yang dikombinasikan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan *logic model framework* dalam penataan arsitektur kinerja program dan kegiatan.



Gambar 2.1. Peta Strategi BPS Kota Surabaya 2020–2024

Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 tanggal 12 Mei 2020. Sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022. BPS dalam menentukan arah kebijakan dan strateginya pada tahun 2020 – 2024 telah mempertimbangkan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN, serta pencapaian tujuan BPS. Sehingga arah kebijakan dan strategi BPS Kota Surabaya akan mendukung arah kebijakan dan strategi BPS yaitu sebagai berikut:

 Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan di Kota Surabaya

Arah Kebijakan : Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas di Kota Surabaya

Strategi:

- a. Meningkatkan akurasi data melalui penjaminan kualitas di setiap tahap kegiatan statistik dasar dan pembinaan statistik sektoral
- b. Memastikan kemutakhiran data
- c. Melakukan Risk Management di setiap kegiatan statistik dasar dan pembinaan statistik sektoral
- d. Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator:

- a. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi.
- b. Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
- Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN di Kota Surabaya

Arah Kebijakan : Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN di Kota Surabaya

Strategi:

- a. Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik
 Nasional
- Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral
- Memaksimalkan peran BPS Kota Surabaya sesuai Peraturan Presiden
 Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- d. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator:

- a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik
- Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar
- 3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

Arah Kebijakan : Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Strategi:

- a. Melakukan pembinaan statistik sektoral ke K/L/D/I di Kota Surabaya
- b. Penguatan Koordinasi dengan OPD

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik.

4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi

Arah Kebijakan : SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Strategi:

- a. Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja
- b. Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja
- c. Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien

- d. Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima
- e. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator:

- a. Hasil penilaian implementasi SAKIP
- b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana.

Tabel. 2.4. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		
(1)	(2)	(3)		
Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	1.1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)		
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)		
3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)		
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)		



Gambar 2.2. Nilai-Nilai Inti Aparatur Sipil Negara (ASN)

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya Core Values ASN ini sebagai inti dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

Core Values ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo "ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama."

Panduan Perilaku Core Values ASN BerAKHLAK sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.



Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setia kepada NKRI serta Pemerintah yang sah.
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- Bertindak proaktif.

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

ASN harus mempunyai orientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga ditetapkan *Employer Branding* ASN #banggamelayanibangsa



Gambar 2.3. Employer Branding ASN

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Surabaya 2022

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun atau pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja ditetapkan pada awal tahun. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Target Perjanjian Kinerja 2022 BPS Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Strategis	manator innerja		Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Menyediakan Data			
Statistik untuk			
dimanfaatkan sebagai			
dasar pembangunan			
1.1. Meningkatnya	Persentase pengguna data	Persen	92
Pemanfaatan data	yang menggunakan data BPS		
statistik yang	sebagai dasar perencanaan,		
berkualitas	monitoring dan evaluasi		
	pembangunan (%)		
	Persentase publikasi statistik	Persen	100
	yang menerapkan standar		
	akurasi (%)		
2. Meningkatnya			
kolaborasi, integrasi,			
dan standardisasi			
dalam			
penyelenggaraan SSN			
2.1. Penguatan Komitmen	Persentase Organisasi	Persen	30,77
K/L/D/I terhadap SSN	Perangkat Daerah (OPD)		
	yang mendapatkan		
	rekomendasi kegiatan		
	statistik (%)		
	Persentase Organisasi	Persen	50
	Perangkat Daerah (OPD)		
	yang menyampaikan		
	metadata sektoral sesuai		
	standar (%)		

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	92,31
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	65
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	93

Bab 3. Akuntabilitas Kinerja

3.1. Analisis Capaian Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2022

Capaian kinerja BPS Kota Surabaya 2022 merupakan pencapaian dari indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2022. Capaian kinerja diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 yang telah ditetapkan pada awal tahun.

3.1.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Pertama

Tujuan Pertama "Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan" dicapai dengan sasaran strategis Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas. Pengukuran terhadap tujuan dan sasaran strategis tersebut dilakukan dengan beberapa indikator dengan capaian seperti pada tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Tujuan Pertama: Menyediakan Data Statistik Untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
T.1. 1. Menyediakan Data Statistik	untuk di	manfaatk	an sebag	gai dasar
pembangunan				
SS1. Meningkatnya Pemanfaatan data stat	istik yang b	erkualitas		
Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	92	100	108,70
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Persen	100,00	62,50	62,50
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				85,6

Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)

Indikator pertama dari sasaran strategis pertama untuk tujuan pertama adalah Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan. Untuk mengukurnya, konsumen diminta

menyatakan kepuasan terhadap kualitas data statistik (BPS) yang meliputi 5 (lima) ragam data, yaitu: Statistik Sosial, Statistik Produksi, Statistik Distribusi dan Jasa, Neraca dan Analisis Statistik, serta Metodologi Statistik. Di setiap ragam data akan ditanyakan 9 (sembilan) pertanyaan meliputi Akurasi/ketepatan data; Kemutakhiran data; Relevansi data; Aksesibilitas data; Komparabilitas data; Koherensi data; Interpretabilitas data; Kelengkapan data; Aktualisasi dan Ketepatan Waktu.

Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%) di hitung dengan menggunakan formula

$$=\frac{x}{y} \times 100\%$$

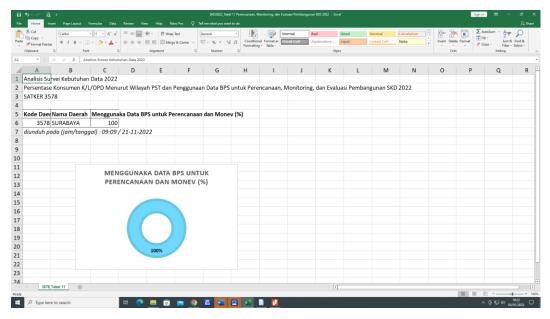
Keterangan:

Jumlah pengguna data yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan.

Jumlah pengguna data yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data BPS

Untuk mengukur persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan dilakukan menggunakan Survei Kebutuhan Data (SKD) yang diselenggarakan secara nasional dengan periode tahunan.

BPS Kota Surabaya sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menghasilkan data statistik, sudah sewajarnya jika BPS dijadikan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Hal tersebut tercermin dari hasil SKD yang menunjukkan sebanyak 100 persen. Jika dibandingkan dengan target sebesar 92 persen, maka capaian kinerja BPS untuk indikator tersebut mencapai 108,70 persen. Hal ini menunjukkan telah tercapainya kinerja dari yang telah ditargetkan.



Gambar 3.1. Hasil SKD 2022

Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi (%)

Berdasarkan Undang-Undang No.16 tentang Statistik Tahun 1997, Badan Pusat Statistik (BPS) berkewajiban menyebarluaskan hasil kegiatannya kepada publik. Cara penyebarluasan bisa melalui *website*, publikasi, dan lain sebagainya. Hingga saat ini penyebarluasan data dan informasi statistik masih banyak dilakukan melalui media publikasi.

Publikasi diperlukan karena adanya suatu kebutuhan terhadap berbagai data dan informasi statistik dari para pengguna. Salah satu jenis yang dicari oleh para pengguna adalah data statistik atau informasi, khususnya bagi para pembuat keputusan. Keputusan-keputusan yang diambil hendaklah didasari pada informasi yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, BPS sebagai penyedia data statistik yang berkualitas dituntut agar mampu menyediakan data atau informasi yang akurat, berkesinambungan dan tepat waktu

Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi (%) di hitung dengan menggunakan formula

$$=\frac{x}{y}\times 100\%$$



Keterangan:

- Jumlah publikasi statistik yang dihasilkan yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi.
- Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi yang ditargetkan terbit.

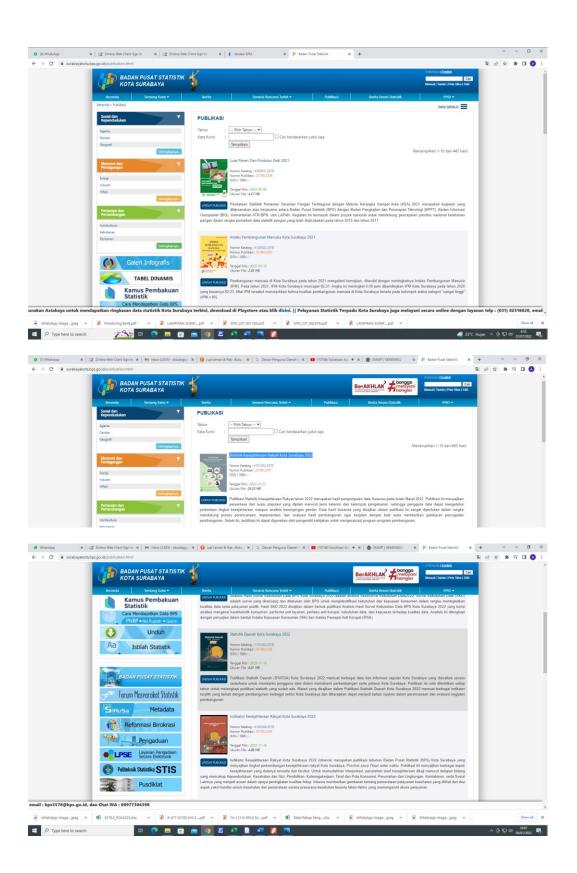
Penanggungjawab dari indikator di atas adalah Fungsi Statistik Distribusi, Fungsi Statistik Sosial, Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, dan Fungsi Statistik Produksi. Target publikasi di dasarkan Daftar Survei yang Dihitung RSE di Tahun 2022 yang ditetapkan oleh BPS. Survei tersebut diantaranya yaitu Susenas Maret, Sakernas Agustus, SPLF, Sitasi 2021, IMK 2021, KSA.

Pada tahun 2022 indikator ini ditargetkan sebanyak 8 publikasi yang menerapkan standar akurasi yaitu

- Publikasi KSA 2021 (Luas Panen Dan Produksi Padi 2021)
- Indeks Pembangunan Manusia
- Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya 2022
- Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya
- Keadaan Ketenagakerjaan Kota Surabaya Tahun 2022
- Sitasi 2021
- **IMK 2021**
- **SPLF**

Dari delapan target ini yang berhasil terbit ada 5 publikasi atau sebesar 62,5 persen. Kelima publikasi yang berhasil terbit yaitu

- Publikasi KSA 2021 (Luas Panen Dan Produksi Padi 2021)
- Indeks Pembangunan Manusia
- Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya 2022
- Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya
- Keadaan Ketenagakerjaan Kota Surabaya Tahun 2022





Gambar 3.2. Publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi

Sedangkan 3 publikasi yang tidak terbit diantaranya adalah SPLF, hal ini disebabkan belum tersedianya Raw Data dan indikator yang diterbitkan oleh BPS.

Untuk Publikasi Profil Industri Mikro dan Kecil 2021 yang semula dijadwalkan rilis tahun 2022 dinyatakan tunda rilis menjadi tahun 2023 dengan alasan finalisasi tabulasi yang masih dalam proses konfirmasi ke metodologi, sesuai dengan surat Direktur Statistik Industri no. B-358/05300/VS.600/12/2022 tanggal 30 Desember 2022



Gambar 3.3. Surat Direktur Statistik Industri Tentang Tunda Rilis VIMK 2021

Untuk Publikasi Survei Pertanian Terintegrasi 2021 (SITASI 2021) dengan memperhatikan hasil evaluasi pengolahan data di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota maka rilis publikasi Sitasi 2021 belum dapat dilaksanakan pada tahun 2022. Pertimbangan-pertimbangan strategis untuk kemungkinan rilis berikutnya akan didiskusikan dan dikomunikasikan lebih lanjut, sesuai dengan surat Direktur Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan no. B-599/05200/VS.630/12/2022 tanggal 22 Desember 2022



Gambar 3.4. Surat Direktur Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tentang Rilis Publikasi Sitasi 2021

3.1.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Kedua

Tujuan kedua "Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN" dicapai dengan sasaran strategis "Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN". Pengukuran terhadap tujuan dan sasaran strategis tersebut dilakukan dengan beberapa indikator dengan capaian seperti pada tabel 3.2. berikut:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tujuan Kedua: Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi Dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan SSN

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	integrasi	dan sta	ndardisas	i dalam
penyelenggaraan SSN				
SS2. Penguatan Komitmen K/L/D/I terha	dap SSN			
Persentase Organisasi Perangkat	Persen	30,77	30,77	100,00
Daerah (OPD) yang mendapatkan				
rekomendasi kegiatan statistik (%)				
Persentase Organisasi Perangkat	Persen	50	46,15	92,30
Daerah (OPD) yang menyampaikan				
metadata sektoral sesuai standar (%)				
Rata-rata Capaian Ind	ikator Sasa	ran		96,15

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)

Kegiatan statistik seperti survei tidak hanya dilakukan oleh BPS saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya. Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, instansi pemerintah yang akan melakukan kegiatan statistik diwajibkan melaporkan kegiatan statistik yang akan dilaksanakan kepada BPS. Setelah diteliti dan diproses oleh BPS akan dikeluarkan suatu rekomendasi yang menyatakan kegiatan yang bersangkutan layak atau tidak untuk dilanjutkan. Tujuan pelaporan kegiatan statistik adalah untuk melengkapi Sistem Statistik Nasional (SSN), agar dalam mengadakan kegiatan statistik tidak terjadi duplikasi kegiatan statistik.

Adanya pemberitahuan kegiatan statistik sektoral ke BPS diharapkan dapat membantu masyarakat umum dalam mencari data statistik yang diperlukan. Metadata base kegiatan statistik yang dikembangkan tidak hanya memuat kegiatan statistik dasar (kegiatan statistik yang dilaksanakan BPS) tetapi juga mencakup kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah selain BPS dan lembaga swasta. Peran aktif instansi pemerintah dalam melaporkan kegiatan statistik ke BPS sangat membantu BPS dalam mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien.

Pada prinsipnya, semua instansi pemerintah, baik kementerian maupun lembaga pemerintah non kementerian yang memperoleh dana dari APBN dan atau APBD wajib memberitahukan, mengikuti rekomendasi dari BPS, dan menyerahkan hasil penyelenggaraan survei mereka. Proses ini tidak berlaku untuk instansi pemerintah lain yang karena undang-undang tidak masuk UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik.

Proses ini juga berlaku bagi survei yang dilaksanakan oleh konsultankonsultan yang bekerjasama dengan instansi pemerintah. Suatu survei dikategorikan sebagai dilaksanakan oleh instansi pemerintah apabila kegiatan survei tersebut:

Dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah

Di sub kontrakkan kepada pihak lain (konsultan)

Didanai 50% atau lebih oleh pemerintah (APBN/APBD)

Jika sebuah perusahaan konsultan independen ditugaskan oleh suatu instansi pemerintah untuk menyelenggarakan suatu survei atas nama instansi pemerintah yang bersangkutan, maka survei yang dilaksanakannya tetap harus mengikuti rekomendasi dari BPS. Informasi yang harus diberikan ke BPS sama seperti jika instansi pemerintah tersebut menyelenggarakan survei sendiri.

Jika survei yang dilakukan merupakan inisiatif dari perusahaan konsultan tersebut sebagai bagian dari pelayanan mereka, akan tetapi diawasi dan didanai oleh instansi pemerintah maka survei tersebut juga harus mengikuti rekomendasi dari BPS.

Jika survei yang diselenggarakan dananya merupakan patungan antara perusahaan konsultan dan instansi pemerintah maka yang bertanggung jawab melaporkan dan meminta rekomendasi BPS adalah instansi pemerintah yang mendanai sebagian survei tersebut.

Capaian Indikator tersebut diperoleh melalui rumusan Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) produsen data yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS Kabupaten/Kota dibagi dengan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi target pembinaan dikalikan dengan 100% dengan formula matematis sebagaimana berikut:

$$P LmRS = \frac{JLmRS}{JLR} \times 100\%$$

Keterangan:

P LmRS : Persentase OPD produsen data yang mendapatkan rekomendasi

kegiatan statistik.

JLmRS : Jumlah OPD produsen data yang mendapatkan rekomendasi

kegiatan statistik.

JLR : Jumlah OPD produsen data yang menjadi target pembinaan.

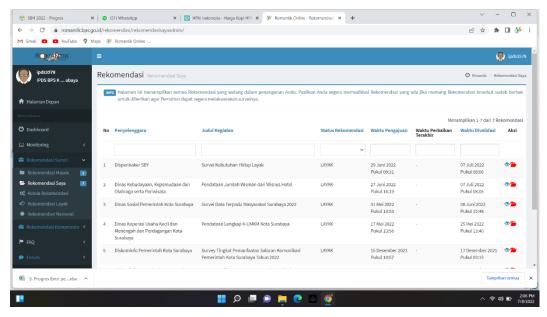
Pengukuran ini bermanfaat untuk mengukur tingkat capaian Badan Pusat Statistik dalam membina kegiatan statistik OPD melalui rekomendasi kegiatan statistik yang didapatkan oleh OPD diselenggarakan dengan periode tahunan.

Pada tahun 2022 ditetapkan target sebesar 30,77 persen adalah 4 OPD yang mendapat rekomendasi kegiatan statistik dari 13 OPD yang menjadi target pembinaan. 13 OPD yang menjadi target pembinaan adalah (1) Dinas Pendidikan, (2) Dinas Kesehatan, (3) Dinas Sosial, (4) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, (5) Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian, (6) Dinas Lingkungan hidup, (7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (8) Dinas Komunikasi dan Informatika, (9) Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, (10) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, (11) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, (12) Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, (13) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Target 4 OPD yang mendapat rekomendasi kegiatan statistik berhasil dicapai pada tahun 2022 ini. Dengan demikian tingkat capaian kinerjanya adalah 100 persen.

Adapun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistic adalah

- Dinas Sosial
- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
- Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata



Gambar 3.5. Rekomendasi Statistik di Aplikasi romantik.bps.go.id

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)

Metadata adalah Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Metadata mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file/data tersebut dalam suatu basis data. Dasar hukum penyusunan metadata statistik adalah:

- a. UU NO. 16 TAHUN 1997 tentang Statistik
- b. Peraturan Walikota Surabaya No. 126 Tahun 2021
- c. Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
- d. MISI BPS untuk memperkuat SSN

Penyusunan metadata statistik yang tepat bermanfaat untuk:

- 1. Bagi Pengembang Data/Peneliti
 - Menghindari duplikasi
 - Sharing informasi
 - Publikasi output



- Mengurangi beban kerja
- Dokumentasi data dan informasi

2. Bagi Pengguna Data

- Memudahkan pencarian maupun evaluasi informasi
- Memudahkan dalam menggunakan data agar sesuai dengan yang diperlukan
- Memudahkan dalam mengidentifikasi bagaimana data tersebut diperoleh, dihitung, dan diestimasi

3. Bagi Organisasi/Institusi

- Memudahkan pengelolaan data dan informasi sebagai investasi organisasi
- Dokumentasi tahapan pengolahan data, pengendalian mutu, definisi, penggunaan data, keterbatasan, dan sebagainya
- Memudahkan mengingat keberadaan data
- Membantu instansi lain yang berpotensi menggunakan data

Jenis-jenis metadata sektoral adalah:

a. Metadata Kegiatan:

Menjelaskan rencana kegiatan hingga publikasi hasil. Metadata Kegiatan memuat:



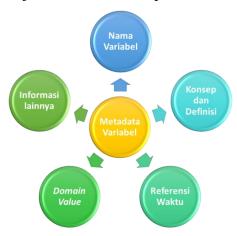
Gambar 3.6. Muatan Dalam Metadata Kegiatan

b. Metadata Indikator: Menjelaskan teknis memperoleh indikator



Gambar 3.7. Indikator Metadata

c. Metadata Variabel: Menjelaskan teknis memperoleh indikator



Gambar 3.8. Variabel Metadata

Capaian Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%) diperoleh melalui rumusan Jumlah OPD yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar dibagi dengan Jumlah OPD yang melakukan kegiatan statistik dikalikan 100% dengan formula matematis sebagaimana berikut:

$$P LmM = \frac{JLmM}{JLs} \times 100\%$$

Keterangan:

P LmM : Persentase OPD yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar.

JLmM : Jumlah OPD yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai

standar

JLs : Jumlah OPD yang melakukan kegiatan statistik.

Pada tahun 2022 ditetapkan target sebesar 50% diperoleh dari 13 OPD dibagi 26 OPD yang melakukan kegiatan Statistik. (1) Dinas Pendidikan, (2) Dinas Kesehatan, (3) Dinas Sosial, (4) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, (5) Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian, (6) Dinas Lingkungan hidup, (7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (8) Dinas Komunikasi dan Informatika, (9) Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, (10) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, (11) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, (12) Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, (13) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, (14) Sekretariat Daerah, (15) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, (16) Dinas Sumber daya air dan bina marga, (17) Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan, (18) Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan, (19) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (20) Dinas Perhubungan, (21) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (22) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (23) Satuan Polisi Pamong Praja, (24) Badan Pendapatan Daerah, (25) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (26) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

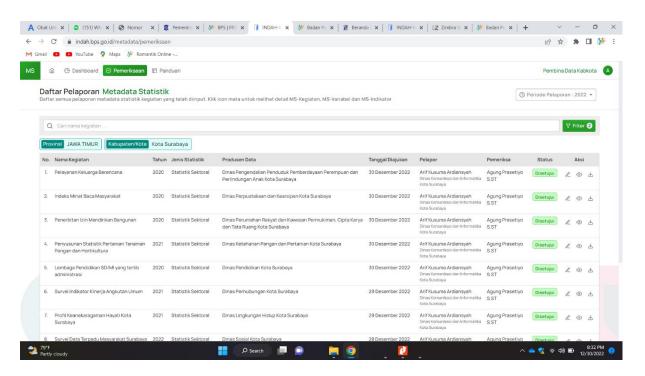
Adapun unit kerja yang menjadi penanggungjawab dari indikator diatas adalah Fungsi teknis yaitu Fungsi IPDS. Pada tahun 2022 indikator ini ditargetkan sebanyak 13 metadata atau sebesar 50 persen, dan realisasinya mencapai 12 metadata atau 46,15 persen. Dengan demikian tingkat capaian kinerjanya adalah 92,31 persen. Walaupun target indikator ini belum tercapai secara OPD yang menyampaikan metadata namun demikian jumlah metadata yang disampaikan melebihi target dikarenakan satu OPD ada yang menyampaikan lebih dari satu metadata sehingga metadata yang disampaikan sebanyak 14.

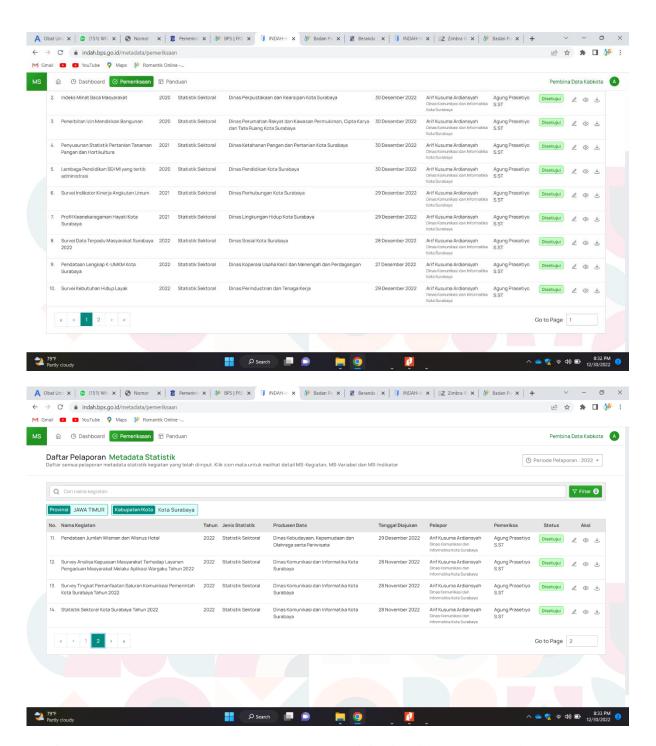
Kendala yang dihadapi dalam penyampaian metadata ini karena belum sepenuhnya terpahami dengan baik oleh OPD untuk menyampaikan metadatanya

melalui aplikasi indah.bps.go.id. Dengan demikian untuk tindak lanjut kedepan BPS Kota Surabaya akan lebih luas lagi menyampaikan sosialisasi dan koordinasi kepada OPD-OPD yang lain.

Pengumpulan Metadata dilakukan dengan aplikasi indah.bps.go.id, ada 14 metadata statistik kegiatan sektoral dari 12 OPD yaitu

- Dinas Pendidikan.
- Dinas Sosial,
- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian,
- Dinas Lingkungan hidup,
- Dinas Komunikasi dan Informatika,
- Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan,
- Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata,
- Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan,
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
- Dinas Perhubungan,
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan





Gambar 3.9. Pengumpulan Metadata Melalui Aplikasi indah.bps.go.id

3.1.3. Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Ketiga

Tujuan ketiga "Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN" dicapai dengan sasaran strategis "Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I". Pengukuran terhadap tujuan dan sasaran strategis tersebut

dilakukan dengan beberapa indikator dengan capaian seperti pada tabel 3.3. berikut:

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Tujuan Ketiga: Meningkatnya Pelayanan Prima Dalam Penyelenggaraan SSN

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)				
T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN								
SS3. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/	I							
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	92,31	100	108,33				
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran								

Untuk mengukurnya digunakan rumusan Jumlah OPD yang mendapat pembinaan statistik dibagi dengan jumlah OPD yang menjadi target pembinaan dikalikan 100% dengan formula matematis:

$$P LmSS = \frac{JLmSS}{JLs} \times 100\%$$

Keterangan:

P LmSS : Persentase OPD yang mendapat pembinaan statistik (%).

JLmSS : Jumlah OPD yang mendapat pembinaan statistik

JLs : Jumlah OPD yang menjadi target pembinaan statistik

Pada tahun 2022 jumlah OPD yang mendapat pembinaan statistik sebanyak 13 OPD dari 13 OPD yang ditargetkan sehingga capaiannya sebesar 100%.

Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik

- Dinas Sosial
- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
- Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- Dinas Pendidikan
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- Dinas Lingkungan hidup
- Dinas Komunikasi dan Informatika
- Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan,
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Dinas Perhubungan
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Pembinaan Statistik Kepala BPS Kota Surabaya dengan Asisten-1 Pemkot Surabaya, Kepala Bappedalitbang, Kepala Kominfo Tanggal 8 Maret 2022



Pembinaan Statistik Kepala BPS Kota Surabaya dengan Kepala Bappedalitbang Tanggal 9 Maret 2022



Pembinaan Statistik BPS Kota Surabaya dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tanggal 1 April 2022



Pembinaan Statistik BPS Kota Surabaya dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Tanggal 2 Juni 2022



Pembinaan Statistik BPS Kota Surabaya dengan Dinas Sosial Tanggal 27 Juni 2022



Pembinaan Statistik BPS Kota Surabaya dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tanggal 27 Juni 2022



Pembinaan Statistik BPS Kota Surabaya dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tanggal 13 Juli 2022



Pembinaan Statistik BPS Kota Surabaya dengan OPD-OPD Pemerintah Kota Surabaya yang di Fasilitasi Bappedalitbang Tanggal 21 Juli 2022

Gambar 3.10. Pembinaan Statistik BPS Kota Surabaya dengan OPD-OPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022

3.1.4. Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Keempat

Tujuan keempat "**Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi**" dicapai dengan sasaran strategis yaitu SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan. Pengukuran terhadap tujuan dan sasaran strategis tersebut dilakukan dengan beberapa indikator dengan capaian seperti pada tabel 3.4. berikut:

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Tujuan Keempat: Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Dan Reformasi Birokrasi

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)					
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi									
SS4. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola									
kelembagaan									
Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	65	70,05	107,77					
Persentase kepuasan pengguna data	Persen	93	98,4	105,81					
terhadap sarana dan prasarana									
pelayanan BPS									
Rata-rata Capaian Indi	ikator Sasar	an		106,79					

Hasil Penilaian Implementasi SAKIP

Salah satu hal yang menjadi inti dari reformasi birokrasi adalah akuntabilitas instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang akuntabel semakin penting keberadaannya mengingat semakin tingginya ekspektasi dan tuntutan masyarakat atas pelayanan pemerintah. BPS Kota Surabaya sebagai lembaga negara juga harus meningkatkan akuntabilitasnya, sebagaimana yang tertera pada Tujuan keempat Renstra BPS 2020-2024. Akuntabilitas dimaksud tidak hanya dari sisi keuangan saja melainkan juga dari sisi kinerja. Dengan penguatan akuntabilitas ini, diharapkan akan memberi efek peningkatan kinerja yang pada gilirannya akan menghasilkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Capaian Kinerja Tujuan Keempat diukur dengan indikator pertama "Hasil Penilaian Implementasi SAKIP". Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 65 poin. Dari hasil penilaian inspektorat realisasi kinerja indikator ini sebesar 70,05 poin atau sebesar 107,77 persen. Hasil Desk Evaluation

implementasi SAKIP atas lima komponen yang menjadi dasar penilaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5. Hasil Evaluasi Desk Evaluation implementasi SAKIP

Komponen	Bobot	Hasil Evaluasi <i>Desk</i> Evaluation
- Perencanaan Kinerja	30	23,78
- Pengukuran Kinerja	25	19,38
- Pelaporan Kinerja	15	11,73
- Evaluasi Kinerja	10	7,25
- Capaian Kinerja	20	7,92
Total Nilai	100	70,05



Nomor : R-2018/08100/PW.120/12/2022

Sifat Rahasia Lampiran: 1 (satu) set

: Laporan Hasil Evaluasi

atas Implementasi SAKIP Tahun 2022

Yth. BPS Kota Surabaya

di Tempat

Penilaian Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2022 yang dilakukan Inspektorat utama BPS mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015. Ruang lingkup evaluasi mencakup 5 (lima) komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Berdasarkan hasil penilaian untuk kelima komponen tersebut adalah "70.05".

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPS Kota Surabaya beserta jajarannya atas kerjasama dan kesungguhan dalam memenuhi seluruh dokumen pendukung kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP. Semoga BPS Kota Surabaya dapat lebih meningkatkan implementasi SAKIP di satuan kerjanya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Jakarta, 27 Desember 2022

1. Inspektur Utama

Gambar 3.11. LHE Atas Implementasi SAKIP BPS Kota Surabaya Tahun 2022

Dengan demikian capaian pada indikator ini sudah tercapai dari target yang ditetapkan. Namun demikian perlu diambil langkah-langkah untuk memperbaiki masing-masing komponen penilaian Sakip.

Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

Indikator kedua dari sasaran tujuan keempat yaitu Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS. Sarana dan prasarana yang baik merupakan salah satu komponen dalam pelayanan. Oleh sebab itu SKD memasukkan komponen tersebut dalam daftar pertanyaan pada kuesioner SKD. Pertanyaan tersebut selanjutnya dihitung untuk mendapatkan capaian indikator kepuasan pengguna layanan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Kota Surabaya.

Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Kota Surabaya mencapai 98,4 persen. Angka ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan target sebesar 93 persen sehingga capaian kinerja untuk indikator ini hanya mencapai sebesar 105,81 persen.

Capaian kinerja indikator ini sudah tercapai dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan upaya yang terus menerus dilakukan untuk melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada seperti taman, AC dan gedung.





Gambar 3.12. Melakukan Pemaliharaan Gedung Kantor dan AC

3.1.5. Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2018 - 2022

Capaian kinerja yang dihasilkan dari proses kinerja yang dilakukan BPS Kota Surabaya perlu dilakukan pengamatan dari tahun ke tahun. Hal ini diperlukan sebagai monitoring dan evaluasi terhadap faktor-faktor apa saja yang harus ditingkatkan sehingga diperoleh capaian kinerja yang optimal.

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2018 - 2022

Doubondings	Tahun						
Perbandingan	2018	2019	2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
Capaian Kinerja Total	97,85	103,5	99,88	79,43	99,22		

Dari tabel 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2018 – 2022 menunjukkan terjadi fluktuasi capaian kinerja dari tahun ke tahun. Secara umum capaian sudah menunjukan tingkat yang mendekati optimal, namun demikian pada tahun 2021 terjadi penurunan kinerja yang cukup signifikan. Dari pelaporan kinerja tahun 2021 hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dan sosialisai dengan OPD-OPD pemerintah daerah sehingga rekomendasi statistik dan

metadata sektoral masih belum terlaksana dengan baik. Sedangkan ditahun 2022 lebih terkait adanya kebijakan penundaan rilis publikasi oleh BPS sehingga berdampak tidak tercapainya kinerja di daerah.

3.1.6. Capaian Kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2022 Terhadap Target Renstra 2020, 2022 dan 2024

Capaian kinerja BPS Kota Surabaya Tahun 2022 terhadap target Renstra merupakan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 terhadap target Renstra 2020, 2022 dan 2024. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang telah dijalankan oleh BPS Kota Surabaya saat ini dan terhadap target yang akan diraih mendatang. Capaian Kinerja 2022 terhadap Target Renstra 2020, 2022 dan 2024 dapat dilihat pada tabel 3.10. berikut:

Tabel 3.7. Capaian Kinerja 2022 terhadap Target Renstra 2020, 2022 dan 2024

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Target				Realisasi	Capaian Terhadap Target			
	Kinerja 2022	Renstra 2020	Renstra 2022	Renstra 2024	Kinerja 2022	Kinerja 2022	Renstra 2020	Renstra 2022	Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
T.1. Menyediakan Da	ıta Statistik	untuk dima	nfaatkan se	bagai dasar	pembangun	an			
SS1. Meningkatnya Pe	emanfaatar	ı data statistil	k yang berku	alitas					
Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	92	50	92	95	100	108,70	200,00	108,70	105,26
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi (%)	100,00	-	100,00	100	62,50	62,50	-	62,50	62,50
Ra	ata-Rata Ca	ipaian Sasar	an Tujuan Pe	ertama		85,60	100,00	85,60	83,88

		Ta	ırget		Realisasi		Capaian Te	rhadap Targ	et
Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Kinerja 2022	Renstra 2020	Renstra 2022	Renstra 2024	Kinerja 2022	Kinerja 2022	Renstra 2020	Renstra 2022	Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	30,77	-	30,77	46,15	30,77	100,00	-	100,00	66,67
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	50	-	50	58	46,15	92,30	-	92,30	79,57
R	ata-Rata C	apaian Sasa	ran Tujuan Ke	edua		96,15	-	96,15	73,12
T.3. Meningkatnya Pe	elayanan p	rima dalam	penyelengga	araan SSN					
SS3. Penguatan Statis	stik Sektora	ıl K/L/D/I							
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	92,31	-	92,31	93,33	100	108,33	-	108,33	107,15
R	ata-Rata C	apaian Sasa	ran Tujuan Ko	etiga		108,33	-	108,33	107,15
T.4. Penguatan tata k	elola keler	mhanaan da	n reformaci	hirokrasi					
SS4. SDM Statistik ya					a kelola kelen	nhagaan			
Hasil Penilaian	.g Onggui	aan bordaya	Janiy udlaill	norangna lak	. Noivia Noivii				
Implementasi SAKIP	65	64	66	70	70,05	107,77	109,45	106,14	100,07
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	93	100	93	95	98,4	105,81	98,40	105,81	103,58
						106,79	103,93	105,97	101,83

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Target		Realisasi		Capaian Te	rhadap Targ	et		
	Kinerja 2022	Renstra 2020	Renstra 2022	Renstra 2024	Kinerja 2022	Kinerja 2022	Renstra 2020	Renstra 2022	Renstra 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Ra	Rata-Rata Capaian Sasaran Tujuan Keempat								
	Ca	apaian Kinerj	a Total			99,22	-	99,01	91,49

Capaian Kinerja Total tahun 2022 tidak bisa dibandingkan karena adanya perubahan Perka IKU sehingga ada perbedaan dasar hitung terhadap indikatorindikator sasaran. Sedangkan jika dibandingkan terhadap capaian renstra 2022 maupun 2024, capaian kinerja total tahun 2022 sebesar 99,22 telah melampaui target capaian renstra 2022 dan 2024 yaitu sebesar 99,01 dan 91,49.

3.1.7. Analisis Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja (Suplemen)

BPS Kota Surabaya menetapkan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja selama tahun 2022 dengan satu sasaran dan tujuh indikator kinerja. Sasaran tersebut adalah meningkatkan kinerja dalam rangka reformasi birokrasi dan tata kelola kelembagaan.

Tabel 3.8. Capaian Kinerja Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja (Suplemen)

	Sasaran/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mer	ningkatkan kinerja dalam rangka reformasi birokra	asi dan tata ke	lola kelemba	agaan	
1.	Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Pagu	Persen	98	93,33	95,23
2.	Tersedianya Layanan Pojok Statistik	Unit	1	1	100,00
3.	Jumlah Desa Cinta Statistik (Cantik)	Desa	1	5	120,00
4.	Hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan ZI	Point	45	42,39	94,20
5.	Persentase Pelaporan Dokumen Melalui SPI Online	Persen	100	100	100,00
6.	Persentase Kepatuhan Pelaporan LHKPN/LHKASN	Persen	100	100	100,00
7.	Terselenggaranya Pengukuran Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Pemda	1	0	0
	Rata-rata Capaian K	inerja			87,06

Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Pagu.

Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 50.766.506.840 dari pagu 54.394.013.000 atau sebesar 93,33 persen sedangkan target yang ditetapkan adalah 98 persen sehingga capaian kinerja hanya mencapai 95,23 persen . Kendala utama dalam pencapaian indikator tersebut adalah adanya kegiatan tambahan dengan anggaran sebesar Rp. 36.951.342.000,- yaitu Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 yang dilaksanakan BPS mulai September 2022. Banyaknya sisa anggaran seperti sisa lelang yang tidak terserap hal ini disebabkan penggunaan anggaran yang kurang *flexible* sehingga optimalisasi terhadap sisa anggaran sulit untuk direalisasikan. Untuk mengatasi kendala tersebut, BPS Kota Surabaya mengupayakan beberapa kali mengusulkan revisi anggaran kepada Sestama BPS sebagaimana yang telah diatur.

Tersedianya Layanan Pojok Statistik

Realisasi Tahun 2022 adalah sebesar 1 unit layanan dengan capaian kinerja 100 persen dari target. Pojok Statistik BPS Kota Surabaya ada di Universitas Surabaya (Unesa)



Gambar 3.13. Pojok Statistik di Universitas Surabaya

Jumlah Desa Cinta Statistik (Cantik)

Pada tahun 2022 BPS Kota Surabaya telah melakukan Pembinaan kepada 5 Kelurahan Cinta Statistik yaitu Kelurahan Nginden Jangkungan kecamatan Sukolilo, Kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung, Kelurahan Lontar

Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng, dan Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Hal ini menunjukan pencapaian sebesar 120 persen dari satu kelurahan yang ditargetkan. Kendala yang dihadapi masih mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan oleh kelurahan terkait dengan perstatistikan, kebanyakan menginginkan otomatisasi program dengan IT sehingga diperlukan SDM yang mumpuni untuk melakukannya. Untuk sementara masih dilakukan pembinaan tentang statitik secara umum untuk membangkitkan keinginan dan kompetensi aparat kelurahan tentang perstatistikan.

Hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan ZI.

Realisasi dari indikator ini adalah 42,39 point dari target sebesar 45 dengan capaian kinerja sebesar 94,20 persen. Dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tim inspektorat masih terdapat kekurangan bukti-bukti pendukung atas enam pilar, sehingga inspektorat merekomendasikan untuk:

- 1. Meningkatkan pemahaman tentang definisi kinerja yang diemban serta target kinerja yang akan dicapai oleh satuan kerja, sehingga dapat merumuskan strategi pencapaian kinerja yang lebih baik lagi;
- 2. Menerapkan manajemen risiko yang dimulai dengan penyusunan peta risiko dan mitigasi risiko serta pengendalian secara berkelanjutan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat mempengaruhi integritas;
- 3. Memperbaiki strategi komunikasi untuk meningkatkan kedekatan dengan masyarakat atau pemangku kepentingan. Penguatan strategi komunikasi ini diharapkan memberikan pemahaman kepada pengguna layanan atas berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh unit kerja dalam meningkatkan kualitas layanan;
- 4. Mempersiapkan inovasi pelayanan publik yang dimiliki guna menjadi bukti saat terpilih untuk diusulkan menjadi Calon Satuan Kerja berpredikat WBK/WBBM

Sehingga BPS Kota Surabaya melakukan internalisasi pelaksanaan RB dan pembangunan ZI secara periodik dan berkelanjutan, adaptif terhadap LKE Reform, dan melakukan koordinasi dan konsultasi ke BPS Provinsi Jawa Timur.

Persentase Pelaporan Dokumen Melalui SPI Online.

Realisasi indikator tersebut adalah sebesar 100 persen dengan capaian kinerja tepat 100 persen. Pelaporan dilakukan secara bulanan dan di monitoring periodik oleh BPS Provinsi Jawa Timur. Tidak ada permasalahan yang membutuhkan solusi dikarenakan adanya strategi yang telah ditetapkan di tahap perencanaan atas pencapaian target indikator yaitu melakukan pemenuhan dokumen SPI sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dengan tertib, menindaklanjuti setiap hasil monitoring dari BPS Provinsi Jawa Timur, dan melakukan monitoring IKI memuat persentase pelaporan Dokumen SPI pada IKI Kasubbag Umum dan Anggota Tim SAI yang menjadi operator SPI *Online*.

Persentase Kepatuhan Pelaporan LHKPN/LHKASN.

Realisasi Tahun 2022 adalah sebesar 100 persen dengan capaian kinerja tepat 100 persen. Empat orang pegawai WL LHKPN berhasil menyelesaikan pelaporan tepat pada waktunya dan 38 orang pegawai lainnya berhasil menyelesaikan pelaporan LHKASN pada Februari 2022.

Strategi yang telah dilaksanakan untuk pencapaian target indikator yaitu melakukan monitoring harian pada periode pelaporan, pendampingan kepada pegawai yang mengalami kendala laporan, melakukan evaluasi hasil finalisasi pelaporan.

Tabel 3.9. Monitoring Pelaporan LHKPN dan LHKASN

No	Nama	Pengisian			
	Lengkap	Sudah/Belum	Tanggal		
1	Agus Budi Santoso, S.E	V	LHKPN		
2	Ali Subagiyo, S.T., M.M.	V	13-02-2022		
3	Nur Arsywati Huda, S.E.	V	18-02-2022		
4	Upeniatika Priety Putri, SH	V	20-02-2022		
5	Maryto Maretis Sihombing, A.Md	V	LHKPN		
6	Lusy Rochmayanti	V	18-02-2022		
7	Mohammad Imron, S.Si, MM	V	LHKPN		
8	Wahyuningsih, SST, M.E.K.K	V	19-02-2022		
9	Wulan Nuryulianingdyah, S.Si	V	19-02-2022		
10	Iswanto, SST	V	LHKPN		
11	Maria Dawa, S.E.	V	19-02-2022		

No	Nama	Pen	gisian
110	Lengkap	Sudah/Belum	Tanggal
12	Nurcholis, S.Si	V	15-02-2022
13	Titik Suryani	V	20-02-2022
14	Lilik Hariyanti SST., M.Stat.	V	20-02-2022
15	Fadjar Suhaeri, S.E.	V	19-02-2022
16	Rizka Ayu Oktaviani, SST	V	19-02-2022
17	lir Lismawati, S.Si	V	18-02-2022
18	Agip Yunaidi Solichin S.Si.,MM	V	21-02-2022
19	Setyorini Indah Purwanti, SST	V	19-02-2022
20	Damainsa Prahesti Nukyanto, SST	V	19-02-2022
21	Agung Prasetiyo, SST	V	19-02-2022
22	Dina Paramita, SST	V	21-02-2022
23	Heri Purnomo, S.E., MM	V	18-02-2022
24	Hadi Siswanto, S.E., MH	V	18-02-2022
25	Soleh Afandi, SE, MM	V	18-02-2022
26	Aris Kuswantoro, S.E., MM	V	18-02-2022
27	Fahrudin Sukarno	V	19-02-2022
28	Ary Hindratmo, S.Mn	V	18-02-2022
29	Achmad Riyadi, S.E.	V	20-02-2022
30	Jamaludin	V	18-02-2022
31	Antonius Priyo Trikristiono, S.E.	V	21-02-2022
32	Falah Hardiman, S.E.	V	18-02-2022
33	Irma Fatmawati, S.Si, M.E	V	16-02-2022
34	Puji Hastutik, A.Md	V	19-02-2022
35	Bagus Wahyu Purnomo, A.Md	V	11-02-2022
36	Paramitha Dian Linggani Putri, A.Md	V	18-02-2022
37	Retno Larasati, A.Md	V	19-02-2022
38	Diah Asri Nindyaswari, SST	V	19-02-2022
39	Suwarno, A.Md	V	19-02-2022
40	Ichwan Fu'adi	V	20-02-2022
41	Risti Sagita Rahmayanti, A.Md	V	18-02-2022
42	Aries Kurniawan	V	20-02-2022

Terselenggaranya pengukuran Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Realisasi Tahun 2022 pengukuran Indeks Pembangunan Statistik (IPS) belum dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Permasalahannya karena belum terbitnya SK Tim Penilai Internal oleh Walikota. Namun demikian sudah ada draf rencana Tim Penilai Internal dan sudah dilakukan pembinaan oleh Tim Penilai Badan (TPB) oleh 3 orang pegawai BPS Kota Surabaya.

3.2. Prestasi BPS Kota Surabaya Tahun 2022

Penghargaan Terbaik I BPS Kabupaten/Kota di Jawa Timur Sebagai Satuan Kerja Dengan Penyelesaian Kegiatan Statistik Harga Tahun 2021



Gambar 3.14. Piagam Penghargaan Terbaik I BPS Kabupaten/Kota di Jawa Timur Sebagai Satuan Kerja Dengan Penyelesaian Kegiatan Statistik Harga Tahun 2021

3.3. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2022

3.3.1. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program

Pagu awal anggaran BPS Kota Surabaya untuk menjalankan fungsi pemerintahan selama tahun 2022 adalah sebesar Rp. 17.843.271.000,-, yang terbagi ke dalam 2 (dua) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen (Dukman), dan (2) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Terdapat tujuh belas kali revisi anggaran yang merubah pagu anggaran, sehingga pada revisi terakhir pagu menjadi sebesar Rp. 54.394.013.000,-. Realisasi anggaran belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 50.766.506.840,-atau sebesar 93,33 persen. Realisasi anggaran menurut program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Dukungan	6.940.076.000	6.811.775.610	98,15
Manajemen (Dukman)			
Program Penyediaan dan	47.453.937.000	43.954.731.230	92,63
Pelayanan Informasi Statistik			
(PPIS)			
Total	54.394.013.000	50.766.506.840	93,33

Berdasarkan tabel 3.8. realisasi anggaran program Dukman adalah sebesar 98,15 persen dari pagu anggaran program Dukman dan realisasi anggaran program PPIS adalah sebesar 92,63 persen dari pagu anggaran program PPIS. Penyerapan anggaran BPS Kota Surabaya secara keseluruhan adalah sebesar 93,33 persen dari total pagu.

3.3.2. Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Program dan Sasaran

Untuk menjalankan tujuan dan sasaran kinerja disediakan anggaran yang diambilkan Program Dukungan Manajemen (Dukman) dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Tabel 3.11. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Program dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Kegiatan/Output	Capaian Kinerja	Pagu 2022	Realisasi 2022	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	ediakan data dasar pemba	a statistik untuk dimanfaatkan ngunan	86	47.443.986.000	43.945.972.230	92,63
	S1.1 Menir yang berku	ngkatnya pemanfaatan data statistik Ialitas	86	47.443.986.000	43.945.972.230	92,63
		2898.BMA.007 Publikasi/Laporan Statistik neraca Pengeluaran		29.284.000	29.011.000	
		2899.BMA.006 Publikasi/Laporan Statistik neraca Produksi		15.518.000	15.518.000	
		2900.BMA.005 Dokumen, Laporan, Dan Publikasi Pengembangan Metodologi Sensus Dan Survei		468.000	-	

Tujuan	Sasaran	Kegiatan/Output	Capaian Kinerja	Pagu 2022	Realisasi 2022	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		2902.BMA.004 Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang Terbit Tepat Waktu		41.890.000	31.499.500	
		2903.BMA.009 Publikasi/Laporan Statistik Harga		1.757.194.000	1.630.049.900	
		2904.BMA.006 Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi dan Konstruksi		342.056.000	324.167.000	
		2905.BMA.004 Publikasi/Laporan Sakernas		298.127.000	269.488.000	
		2905.QMA.006 Publikasi/Laporan Sensus Penduduk		4.446.616.000	4.276.661.700	
		2906.BMA.006 Publikasi/Laporan Susenas		512.524.000	483.479.100	
		2907.BMA.006 Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial		9.860.000	9.261.900	
		2907.QMA.009 Publikasi/Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi		36.951.342.000	33.926.907.330	
		2908.BMA.004 Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata yang Terbit Tepat Waktu		193.611.000	129.651.000	
		2908.QMA.009 Publikasi/Laporan Statistik E-Commerce		28.371.000	26.726.500	
		2909.BMA.005 Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang terbit tepat waktu		7.884.000	7.864.000	
		2910.BMA.008 Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura dan Perkebunan		3.547.000	2.174.000	
		2910.QMA.006 Publikasi/ Laporan Statistik Sensus Pertanian		2.680.272.000	2.666.702.800	
		2910.QMA.007 Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan		30.889.000	24.803.500	
		2910.QMA.010 Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area		94.533.000	92.007.000	
T.2 Meni standard	ngkatnya ko lisasi dalam	olaborasi, integrasi dan penyelenggaraan SSN	96	9.500.000	8.579.000	90,31
		ngkatnya kolaborasi, integrasi, dan asi dalam penyelenggaraan SSN	96	9.500.000	8.579.000	90,31
		2897.BMA.004 Laporan Diseminasi Dan Metadata Statistik		9.500.000	8.579.000	
	ngkatnya pe nggaraan SS	elayanan prima dalam SN	108	451.000	180.000	39,91
	S3.1 Peng	uatan statistik sektoral K/L/D/I	108	451.000	180.000	39,91
		2897.BDB.003 Laporan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		451.000	180.000	



Tujuan	Sasaran	Kegiatan/Output	Capaian Kinerja	Pagu 2022	Realisasi 2022	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
T.4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi		107	6.940.076.000	6.811.775.610	98,15	
	S4.1 SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan		107	6.940.076.000	6.811.775.610	98,15
		Seluruh Program Dukungan Manajemen		6.940.076.000	6.811.775.610	

Menurut sasaran kinerja anggaran terbesar teralokasikan pada sasaran pertama Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas dengan pagu Rp. 47.443.986.000 dan terealisasi sebesar Rp. 43.945.972.230 atau 92,63 %. Namun demikian capaian kinerja yang dihasilkan baru 85,60. Hal ini disebabkan adanya beberapa output publikasi yang ditunda rilisnya.

Untuk sasaran kedua Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN dengan pagu Rp. 9.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 8.579.000 atau 90,31 %. Penggunaan anggaran ini cukup efektif dengan mengasilkan capaian kinerja sebesar 96,15 persen.

Untuk sasaran ketiga Penguatan statistik sektoral K/L/D/I dengan pagu sebesar Rp. 451.000 dan terealisasi sebesar Rp. 180.000 atau sebesar 39,91%. Hal ini menunjukan penggunaan anggaran yang efektif dengan menghasilkan capaian kinerja sebesar 108,33 persen.

Pada sasaran keempat SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan dengan pagu sebesar Rp. 6.940.076.000 dan terealisasi sebesar Rp. 6.811.775.610 atau sebesar 98,15%. Hal ini menunjukan penggunaan anggaran yang efektif dengan menghasilkan capaian kinerja sebesar 106,79 persen.

3.3.3. Upaya Efisiensi Anggaran dan Nilai Efisiensi Anggaran

Nilai efisiensi dalam pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja yang didapat BPS Kota Surabaya selama tahun 2022 diantaranya :

5. Hasil perhitungan nilai efisiensi dari Form Rencana Aksi tahun 2022 berdasarkan capaian kinerja menurut anggaran tujuan dan sasaran adalah sebesar 37,43%.

6. Hasil pengukuran yang dilakukan Kementerian Keuangan melalui Sistem Aplikasi SMART bahwa pencapaian nilai kinerja menunjukkan kinerja sebesar 86,09, Penyerapan 93,25, tingkat konsistensi sebesar 79,20, efisiensi 6,75 dan Nilai efisiensi sebesar 66,88

Upaya efisiensi yang dilakukan BPS Kota Surabaya selama tahun 2022 diantaranya:

1. Pada sisi penganggaran juga dilakukakan efisiensi dengan melakukan penghematan anggaran untuk memenuhi selfblocking/refocusing. Pada tahun 2022 BPS Kota Surabaya melakukan 17 kali revisi DIPA dengan perubahan pagu untuk menyesuaikan dengan kegiatan. Dari tabel 3.11 terlihat pengurangan pagu anggaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran kegiatan sehingga akan terpenuhi prinsip efektif-efisien.

Tabel 3.12. Rekapitulasi Pagu Anggaran BPS Kota Surabaya Tahun 2022

DEVICE	PROGRAM			
REVISI	DUKMAN	PPIS	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	
AWAL	6.740.259.000	11.103.012.000	17.843.271.000	
REVISI I	6.740.259.000	11.103.012.000	17.843.271.000	
REVISI II	6.740.259.000	11.468.454.000	18.208.713.000	
REVISI III	6.740.259.000	11.468.454.000	18.208.713.000	
REVISI IV	6.740.259.000	11.468.454.000	18.208.713.000	
REVISI V	6.740.259.000	11.468.454.000	18.208.713.000	
REVISI VI	6.743.859.000	11.722.373.000	18.466.232.000	
REVISI VII	6.743.859.000	11.722.373.000	18.466.232.000	
REVISI VIII	6.743.859.000	11.722.373.000	18.466.232.000	
REVISI IX	6.741.686.000	11.723.841.000	18.465.527.000	
REVISI X	6.741.686.000	48.675.183.000	55.416.869.000	
REVISI XI	6.741.686.000	48.675.183.000	55.416.869.000	
REVISI XII	6.741.686.000	48.675.183.000	55.416.869.000	
REVISI XIII	6.854.767.000	48.675.183.000	55.529.950.000	
REVISI XIV	6.854.767.000	48.675.183.000	55.529.950.000	
REVISI XV	6.854.767.000	48.675.183.000	55.529.950.000	
REVISI XVI	6.951.657.000	48.675.183.000	55.626.840.000	
REVISI XVII	6.940.076.000	47.453.937.000	54.394.013.000	

Revisi DIPA yang dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. DIPA Awal

DIPA Awal BPS Kota Surabaya disahkan oleh Direktut Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan pada tanggal 17 November 2021. Anggaran sesuai DIPA Awal adalah sebesar Rp17.843.271.000. Terdiri dari program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (GG) sebesar Rp11.103.012.000 dan program Dukungan Manajemen (WA) sebesar Rp6.740.259.000.

2. Revisi DIPA ke-1

Revisi DIPA kesatu BPS Kota Surabaya disahkan oleh Direktut Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan pada tanggal 15 Desember 2021. Anggaran secara jumlah keseluruhan tidak mengalami perubahan, hanya mengalami pergeseran antar tiap outputnya.

3. Revisi DIPA ke-2

Revisi DIPA kedua BPS Kota Surabaya disahkan oleh Direktut Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan pada tanggal 09 Februari 2022. Anggaran secara keseluruhan mengalami kenaikan menjadi Rp.18.208.713.000. Dengan rincian program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (GG) naik menjadi sebesar Rp11.468.454.000 dan program Dukungan Manajemen (WA) tetap sebesar Rp6.740.259.000. Adapun selisih kenaikn/penurunan per masing-masing output dapat dilihat dari tabel berikut:

Program	Selisih
<u>GG</u>	365.442.000
GG.2897	-
GG.2898	2.757.000
GG.2899	10.118.000
GG.2900	-
GG.2902	49.023.000
GG.2903	259.653.000
GG.2904	3.292.000
GG.2905	(1.848.647.000)
GG.2906	104.582.000
GG.2907	13.755.000
GG.2908	5.237.000
GG.2909	22.062.000
GG.2910	1.743.610.000
<u>WA</u>	
2886	-

Kenaikan anggaran terbesar ada pada Output Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

4. Revisi DIPA ke-3

Revisi DIPA ketiga BPS Kota Surabaya disahkan oleh Direktut Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan pada tanggal 17 Februari 2022. Sama seperti halnya revisi DIPA kesatu Anggaran secara jumlah keseluruhan tidak mengalami perubahan dari revisi kedua, hanya mengalami pergeseran antar tiap outputnya

5. Revisi DIPA ke-4

Revisi DIPA keempat BPS Kota Surabaya disahkan oleh Direktut Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan pada tanggal 07 April 2022. Sama seperti halnya revisi DIPA kesatu Anggaran secara jumlah keseluruhan tidak mengalami perubahan dari revisi ketiga, hanya mengalami pergeseran antar tiap outputnya.

6. Revisi DIPA ke-5

Revisi DIPA kelima BPS Kota Surabaya disahkan oleh Direktut Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan pada tanggal 21 April 2022. Sama seperti halnya revisi DIPA kesatu Anggaran secara jumlah keseluruhan tidak mengalami perubahan dari revisi keempat, hanya mengalami pergeseran antar tiap outputnya.

7. Revisi DIPA ke-6

Revisi DIPA keenam BPS Kota Surabaya disahkan oleh Direktut Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan pada tanggal 27 Mei 2022. Pada revisi keenam ini anggaran mengalami kenaikan menjadi Rp18.466.232.000. Tidak hanya pada program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (GG) saja yang mengalami kenaikan namun juga program Dukungan Manajemen (WA). Rician kenaikan anggaran pada revisi DIPA keenam dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Program	Selisih
<u>GG</u>	253.919.000
GG.2897	•
GG.2898	2.310.000
GG.2899	-
GG.2900	-
GG.2902	-
GG.2903	-
GG.2904	21.072.000
GG.2905	205.367.000
GG.2906	-
GG.2907	-
GG.2908	25.170.000
GG.2909	-
GG.2910	-
<u>WA</u>	3.600.000
2886	3.600.000

Kenaikan anggaran terbesar pada Output Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

8. Revisi DIPA ke-7

Revisi DIPA ketujuh BPS Kota Surabaya disahkan oleh Direktut Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan pada tanggal 15 Juni 2022. Sama seperti halnya revisi DIPA sebelumnya Anggaran secara jumlah keseluruhan tidak mengalami perubahan dari Revisi keenam, hanya mengalami pergeseran antar tiap outputnya.

9. Revisi DIPA ke-8

Revisi DIPA kedelapan BPS Kota Surabaya disahkan oleh Direktut Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan pada tanggal 08 Juli 2022. Sama seperti halnya revisi DIPA sebelumnya Anggaran secara jumlah keseluruhan tidak mengalami perubahan dari Revisi keenam, hanya mengalami pergeseran antar tiap outputnya.

10. Revisi DIPA ke-9

Revisi DIPA kesembilan BPS Kota Surabaya disahkan oleh Direktut Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan pada tanggal 11 Agustus 2022. Secara keseluruhan pagu anggaran



berkurang sebesar Rp.705.000 dari revisi sebelumnya. Pagu program GG bertambah sebesar Rp.1.468.000 sedangkan pagu program WA berkurang sebesar Rp.2.173.000.

11. Revisi DIPA ke-10

Revisi DIPA kesepuluh BPS Kota Surabaya disahkan oleh Direktut Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan pada tanggal 11 Agustus 2022. Secara keseluruhan pagu anggaran naik drastis sebesar Rp.36.951.342.000. Ini merupakan dana untuk kegiatan besar Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) 2022.

12. Revisi DIPA ke-11

Revisi DIPA kesebelas BPS Kota Surabaya disahkan oleh Direktut Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan pada tanggal 29 Agustus 2022. Sama seperti halnya revisi DIPA sebelumnya pagu Anggaran secara jumlah keseluruhan tidak mengalami perubahan dari Revisi keenam, hanya mengalami pergeseran antar tiap outputnya.

13. Revisi DIPA ke-12

Revisi DIPA kedua belas BPS Kota Surabaya disahkan oleh Direktut Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan pada tanggal 20 September 2022. Sama seperti halnya revisi DIPA sebelumnya pagu Anggaran secara jumlah keseluruhan tidak mengalami perubahan dari Revisi keenam, hanya mengalami pergeseran antar tiap outputnya.

14. Revisi DIPA ke-13

Revisi DIPA ke-tigabelas BPS Kota Surabaya disahkan oleh Direktut Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan pada tanggal 20 Oktober 2022. Pada revisi DIPA kali ini pagu DIPA secara keseluruhan bertambah sebesar Rp.113.081.000 dari revisi sebelumnya menjadi Rp.55.529.950.000. Kenaikan hanya terjadi pada program Dukungan Manajemen (WA), sedangkan program PPIS (GG) tetap semua.

15. Revisi DIPA ke-14

Revisi DIPA ke-empatbelas BPS Kota Surabaya disahkan oleh Direktut Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan pada tanggal 02 November 2022. Sama seperti halnya revisi DIPA sebelumnya pagu Anggaran secara jumlah keseluruhan tidak mengalami perubahan dari Revisi ketigabelas, hanya mengalami pergeseran antar tiap outputnya.

16. Revisi DIPA ke-15

Revisi DIPA ke-limabelas BPS Kota Surabaya disahkan oleh Direktut Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan pada tanggal 19 November 2022. Sama seperti halnya revisi DIPA sebelumnya pagu Anggaran secara jumlah keseluruhan tidak mengalami perubahan dari Revisi keempat belas, hanya mengalami pergeseran antar tiap outputnya.

17. Revisi DIPA ke-16

Revisi DIPA ke-enambelas BPS Kota Surabaya disahkan oleh Direktut Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan pada tanggal 30 November 2022. Pada revisi DIPA kali ini pagu DIPA secara keseluruhan bertambah sebesar Rp.96.890.000 dari revisi sebelumnya menjadi Rp.55.626.840.000. Kenaikan hanya terjadi pada program Dukungan Manajemen (WA), sedangkan program PPIS (GG) tetap semua.

18. Revisi DIPA ke-17

Revisi DIPA ke-tujuhbelas BPS Kota Surabaya merupakan revisi DIPA terakhir di tahun 2022 ini. Revisi DIPA disahkan oleh Direktut Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan pada tanggal 12 Desember 2022. Revisi ini selain merubah pagu keseluruhan juga sekaligus revisi pemutakhiran data yang memang harus selalu dilakukan di akhir tahun agar tidak terdapat pagu minus. Pada revisi DIPA kali ini pagu DIPA secara keseluruhan berkurang sebesar Rp.1.221.246.000 dari pagu

sebelumnya sehingga total pagu menjadi Rp.53.394.013.000. Adapun rincian perubahan pagu dapat dilihat dari tebl di bawah ini :

	SELISIH
TOTAL	(1.232.827.000)
Program	
<u>GG</u>	(1.221.246.000)
GG.2897	(25.440.000)
GG.2898	-
GG.2899	•
GG.2900	-
GG.2902	(13.902.000)
GG.2903	(540.634.000)
GG.2904	(167.506.000)
GG.2905	(278.293.000)
GG.2906	•
GG.2907	(53.802.000)
GG.2908	(69.628.000)
GG.2909	(72.041.000)
GG.2910	-
<u>WA</u>	(11.581.000)
2886	(11.581.000)

7. Dari segi penggunaan sumber daya lainnya, BPS Kota Surabaya juga melakukan penghematan penggunaan energi berupa penghematan penggunaan energi listrik dengan memasang himbauan-himbauan kampanye hemat energi.



Gambar 3.15. Himbauan Kampanye Hemat Energi

Bab 4. Penutup

4.1. Kesimpulan

BPS Kota Surabaya senantiasa berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS. Dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan BPS Kota Surabaya telah bersinergi antar fungsi dibawah koordinasi pimpinan.

Terdapat 4 (empat) tujuan strategis yang harus dicapai BPS Kota Surabaya pada tahun 2022, yaitu:

- a. Tujuan pertama yaitu "Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan" dengan sasaran strategis "Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas" rata-rata capaian kinerja sebesar 85,60 persen;
- b. Tujuan kedua yaitu "Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN" dengan sasaran strategis "Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN" rata-rata capaian kinerja sebesar 96,15 persen;
- c. Tujuan ketiga "Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN" dengan sasaran strategis "Penguatan statistik sektoral K/L/D/I" rata-rata capaian kinerja sebesar 108,33 persen; dan
- d. Tujuan keempat "Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi" dengan sasaran strategis "SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan" rata-rata capaian kinerja sebesar 106,79 persen.

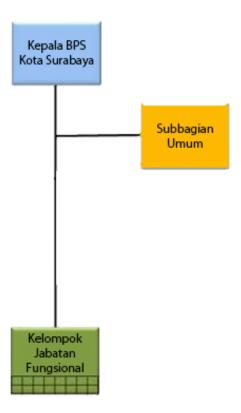
4.2. Rencana Tindak Lanjut

Capaian kinerja BPS Kota Surabaya di tahun 2022 masih banyak kekurangan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk memenuhi capaian kinerja dari setiap tujuan dan sasaran. Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:

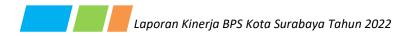
 Pencapaian Kinerja pada Indikator Tujuan Pertama: Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, untuk indikator Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. Perlu lebih ditingkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan dengan stakeholders. Sedangkan untuk indikator Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi, perlu dilakukan upaya pemenuhan data yang akurat sehingga hasil pengolahan data hasil survei/sensus bisa diterbitkan publikasinya.

- 2. Pencapaian Kinerja pada Indikator Tujuan Kedua: Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, untuk indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%), maka BPS Kota Surabaya selaku Pembina Statistik akan lebih melakukan Koordinasi dengan OPD memanfaatkan Perwali Kota Surabaya tentang satu data dan memanfaatkan Forum Satu Data.
- 3. Pencapaian Kinerja pada Indikator Tujuan Ketiga: Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN dengan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%), maka BPS Kota Surabaya berupaya melalui pembinaan yang efektif di bidang statistik dan menambah jumlah OPD untuk mendapatkan pembinaan statistik.
- 4. Pencapaian Kinerja pada Indikator Tujuan Keempat: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan baik dalam hal Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja maupun Capaian Kinerja

Lampiran 1. Bagan Susunan Organisasi



Struktur Organisasi BPS Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 8 Tahun 2020



Lampiran 2. Renstra 2020-2024

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kagiatan (Outnut)/Indikatan		Target Kinerja								
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	2020	2021	2022	2023	2024					
Kementerian/Lembaga: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya										
SS 1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas										
1.1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (%)	50	85,71	92	95	95					
1.2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (%)	-	-	100	100	100					
SS 2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN										
2.1. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	-	-	30,77	38,48	46,15					
2.2. Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar (%)	-	-	50	53	58					
SS 3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I										
3.1. Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	-	-	92,31	92,86	93,33					
SS 4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata k	elola kelem	nbagaan								
4.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	64	65	66	68	70					
4.2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	100	100	93	94	95					



Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2022

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Menyediakan Data Statistik untuk			
dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan		-	0.0
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	92
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Persen	100
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN			
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	30,77
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	50
Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	92,31
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
4.1 SDM Statistik yang Unggul dan berdaya	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	65
saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	93

Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja 2022

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Periode	Target Triwulanan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)					
1. Menyediakan Data								
Statistik untuk								
dimanfaatkan sebagai								
dasar pembangunan 1.1. Meningkatnya	Daycontago pon aguno data yang	Persen	92	Tw I	0	0	0,00	
Pemanfaatan data	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai	reiseii	92	Tw II	0	0	0,00	
statistik yang berkualitas	dasar perencanaan, monitoring			Tw III	0	0	0,00	
sumsum yang camama	dan evaluasi pembangunan (%)			Tw IV	92	100	108,70	
	Persen	100	Tw I	0	0	0		
	Persentase publikasi statistik				Tw II	25	25	25
	yang menerapkan standar akurasi (%)			Tw III	25	25	25	
	akurasi (%)			Tw IV	100	62,5	62,5	
2. Meningkatnya kolaborasi,								
integrasi, dan								
standardisasi dalam								
penyelenggaraan SSN	Parantasa Organisasi Parangkat	Dorgon	30,77	Tw I	0,00	0,00	0,00	
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Persen Daerah (OPD) yang		30,77	Tw II	30,77	30,77	100,00	
IVL/D/I temadap SSIV	mendapatkan rekomendasi			Tw III	30,77	30,77	100,00	
	kegiatan statistik (%)			Tw IV	30,77	30,77	100,00	
	8			1 1/1 1	30,77	50,77	100,00	

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Periode	Target Triwulanan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)				
	Persentase Organisasi Perangkat	Persen	50	Tw I	0,00	0,00	0,00
	Daerah (OPD) yang			Tw II	0,00	0,00	0,00
	menyampaikan metadata			Tw III	23,08	0,00	0,00
	sektoral sesuai standar (%)			Tw IV	50,00	46,15	92,31
Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN							
3.1. Penguatan Statistik	Persentase Organisasi Perangkat	Persen	92,31	Tw I	0,00	0,00	0,00
Sektoral K/L/D/I	Daerah (OPD) yang			Tw II	30,77	38,46	41,67
	mendapatkan pembinaan			Tw III	61,54	100,00	108,33
	statistik (%)			Tw IV	92,31	100,00	108,33
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi							
4.1 SDM Statistik yang	Hasil Penilaian Implementasi	Poin	65	Tw I	0	0	0,00
Unggul dan berdaya	SAKIP			Tw II	0	0	0,00
saing dalam kerangka				Tw III	0	0	0,00
tata kelola kelembagaan				Tw IV	65	70,05	107,77
	Persentase kepuasan pengguna	Persen	93	Tw I	0	0	0
	data terhadap sarana dan			Tw II	0	0	0
	prasarana pelayanan BPS (%)			Tw III	0	0	0
				Tw IV	93	98,4	105,81

Lampiran 5. SDM BPS Kota Surabaya Tahun 2022

No.	Unit Organisasi	≤SMA	Jenja D3	ng Pendidi DIV/S1	kan S2	S 3	Total
1	Kepala BPS Kota Surabaya	-	-	1	-	-	1
2	Sub Bagian Umum	1	2	2	1	-	6
3	Kelompok Fungsional	2	4	11	10	-	27
4	Pelaksana	3	3	5	-	-	11
	Total	6	9	19	11	-	45

Lampiran 6. Kegiatan BPS Kota Surabaya Tahun 2022

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)												
1	Semesteran												
2	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan												
3	Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi Tahun 2022												
4	Survei Sosial Ekonomi Nasional Panel Tahun 2022												
5	Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan												
6	Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022												
7	Penyusunan Komponen Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan												
8	Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba												
9	Konsolidasi PDRB Tahunan Menurut Pengeluaran												
10	Penyusunan PDRB Tahunan Menurut Lapangan Usaha												
11	Peningkatan Kualitas Layanan dan Publikasi												
12	Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik												
13													
14	Penyusunan Integrasi Data Spasial Wilkerstat dan												

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Muatan Hasil SP2020												
15	SBH 2022												
16	Kompilasi Data Transportasi												
17	Pendataan Data IKK												
18	Surve Harga Konsumen dan Beras												
19	Survei Triwulanan K2, BUMD, Lembaga Keuangan dan Keuangan Pemerintah daerah												
20	Survei Jasa dan Pariwisata												
21	Updating Direktori Usaha/Perusahaan												
22	Survei Harga Produsen												
23	Survei Tanaman Pangan												
24	Survei Holtikultura												
25	Survei Perusahaan Perkebunan												
26	Survei Perusahaan Kehutanan Tahunan												
27	Survei Perusahaan Kehutanan Triwulan												
28	Survei Peternakan												
29	Survei Industri												
30	Survei Kontruksi												
31	Pendataan Lahan Pertanian dengan Kerangka Sampel area												
32	Survei Pertambangan dan Penggalian												
33	Survei Energi												

Lampiran 7. Judul Publikasi Yang Terbit Tahun 2022

No	Judul Publikasi	Jumlah	Jadwal Terbit	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	1	Triwulan 2	Nerwil
2	PDRB Kota Surabaya Menurut Pengeluaran	1	Triwulan 2	Nerwil
3	PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha	1	Triwulan 2	Nerwil
4	Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya	1	Triwulan 4	Nerwil
5	Statistik Daerah Kota Surabaya 2022	1	Triwulan 4	Nerwil
6	Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya 2022	1	Triwulan 4	Sosial
7	Direktori Industri Besar Sedang Tahun 2021	1	Triwulan 4	Produksi
8	Statistik Keuangan Daerah Kota Surabaya 2022	1	Triwulan 4	Distribusi
9	Keadaan Ketenagakerjaan Kota Surabaya Tahun	1	Triwulan 4	Sosial
	2022			
	Total	9		





BPS Kota Surabaya Jl. A. Yani 152 - E, Kota Surabaya Website : http://surabayakota.bps.go.id Email : bps3578@bps.go.id